



**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM  
MENCEGAH FRAUD**

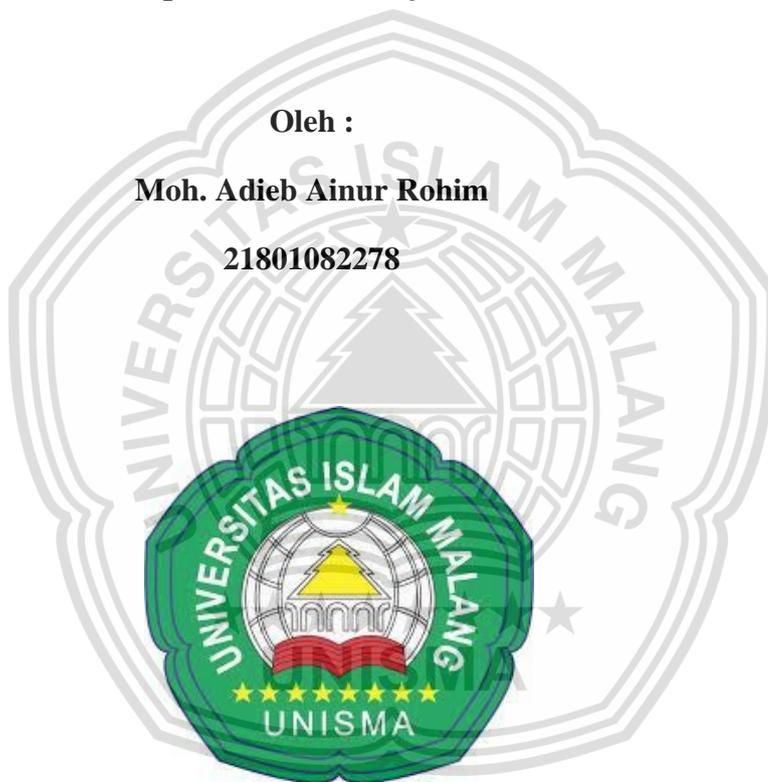
**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh :

**Moh. Adieb Ainur Rohim**

**21801082278**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PRODI AKUNTANSI  
2022**

## ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah kecurangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Instansi Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai selesai. Populasi dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah yang berada di Kota Malang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga diperoleh 57 sampel. Hasil penelitian menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud, Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud dan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud dan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud. berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Fraud

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze and examine the effect of the application of public sector accounting on the performance accountability of government agencies in preventing fraud. This study uses a quantitative approach. The location of this research was conducted at Government Agencies in Malang City. This research will be conducted in October 2021 until it is completed. The population in this study are government agencies located in the city of Malang. Sampling was done based on the purposive sampling method, with predetermined criteria, in order to obtain 57 samples. The results of the study state that Public Sector Accounting has a significant effect on Performance Accountability of Government Agencies, Performance Accountability of Government Agencies has a significant effect on Fraud Prevention, Public Sector Accounting has a significant effect on Fraud Prevention and Public Sector Accounting has a significant effect on Fraud Prevention through Performance Accountability of Government Agencies.*

*Keywords: Public Sector Accounting, Government Agency Performance Accountability and Fraud*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*Fraud* merupakan salah satu tindakan penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi. *Fraud* menjadi sebuah masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Tidak ada institusi/lembaga perusahaan yang benar-benar terbebas dari kemungkinan terjadi adanya *fraud*. Para pelaku *fraud* juga ada di semua lapisan baik itu golongan atas maupun golongan pegawai bawah. Oleh karena itu perlu kepedulian dari berbagai pihak untuk sadar, waspada dan peduli di lingkungan tempat kerja terhadap potensi adanya *fraud* (ACFE, 2019).

Di Indonesia sendiri kasus kecurangan semakin menjadi sebagaimana data yang di publikasi oleh ACFE yang di lakukan setiap dua tahun sekali dan data terakhir yang dipublikasi yakni pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kasus korupsi merupakan tindakan kecurangan terbanyak dengan 167 kasus dengan persentase 69,9% di lanjut dengan tindak kecurangan penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan sebanyak 50 kasus dengan persentase 20,9% serta yang terakhir yakni kasus kecurangan laporan keuangan dengan 22 kasus dengan persentase 9,2% (ACFE, 2019).

Kasus *fraud* yang sering terjadi di Indonesia korupsi menjadi penyumbang terbesar kerugian. *Fraud* dalam bentuk korupsi yang paling banyak untuk kerugian

dibawah Rp.10 juta. Menariknya baik fraud dalam bentuk korupsi, fraud laporan keuangan maupun penyalahgunaan aset mayoritas kasus berada dibawah Rp.10 juta, tetapi kejadian paling banyak. Disisi lain terdapat kejadian yang paling sedikit pada kasus korupsi tetapi nilai kerugiannya terbesar yaitu diatas Rp.10 milyar.

Adapun faktor yang menjadi penyebab tindak kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila, Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif, Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka, Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan, Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.

Sehingga perlu adanya pengawasan pencegahan melalui beberapa teknik pendeteksian kecurangan meliputi Audit internal merupakan salah satu pengendalian yang dimiliki organisasi untuk meminimalkan terjadinya fraud. Dengan demikian, audit internal berperan sebagai salah satu media deteksi awal yang cukup dapat diandalkan oleh organisasi. Audit eksternal secara umum merupakan bagian independen yang memiliki peran utama sebagai pengawas atas penyajian laporan keuangan. Pengamatan dan monitoring pada sebagian besar

literatur dinilai sebagai salah satu pengendalian manajemen yang cukup efektif untuk meminimalkan perilaku disfungsional.

Pemeriksaan dokumen merupakan salah satu media deteksi yang secara umum banyak dilakukan baik dalam ranah pengauditan maupun kegiatan analisis transaksi. Review manajemen merupakan salah satu tindakan pencegahan dan upaya meminimalkan fraud yang tidak dapat diabaikan oleh organisasi. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya pengendalian yang secara umum telah banyak digunakan oleh penegak hukum di Indonesia dan Perkembangan teknologi seiring dengan perkembangan fraud yang terjadi dengan memanfaatkan fasilitas teknologi (Anthony dan Govindarajan, 2016).

Dari banyaknya kendala yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan maka perlu adanya akuntabilitas instansi pemerintah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan

transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah keuangan dan nonkeuangan (BPKP, 2002 ). Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik *good governance* berkenaan dengan *participation, rule of law, transparency; responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency* dan *strategy vision* (Mardiasmo, 2002).

Landasan hukum agar setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja. Menurut Soleman (2007) saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya *good governance*, yaitu Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan berbagai peraturan

perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka perlu adanya akuntansi sektor publik yang baik.

Hal ini dikarenakan Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014: 2).

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Haryanto, et al., (2017:1) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih

maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi *financial* atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Penerapan akuntansi sektor publik yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang diungkapkan Pamungkas (2012) bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan apabila akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik yang di sebabkan oleh akuntansi sektor publik maka hal tersebut akan mencegah terjadinya fraud sebagaimana yang diungkapkan oleh Santoso et.,al (2008) bahwa penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat mencegah *fraud*.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dan perbrdaan hasil penelitian-penelitian yang telah di lakukan, penelitian tertarik untuk meneliti kembali mengenai penerapan akuntansi sektor publik, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH *FRAUD*”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencegahan *fraud*?

### 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Penelitian ini untuk menganalisis akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*
3. Penelitian ini untuk menganalisis akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*
4. Penelitian ini untuk menganalisis penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencegahan *fraud*

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah daerah Kota Malang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi khususnya penerapan akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah *fraud*.

2. Secara teoritis

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat di jadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah. Dan juga tugas akhir skripsi ini akan memperkaya jumlah literatur yang dapat digunakan oleh kalangan akademisi.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap Pencegahan Fraud melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model analisis jalur, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud.
3. Variabel Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud.
4. Variabel Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

#### 5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

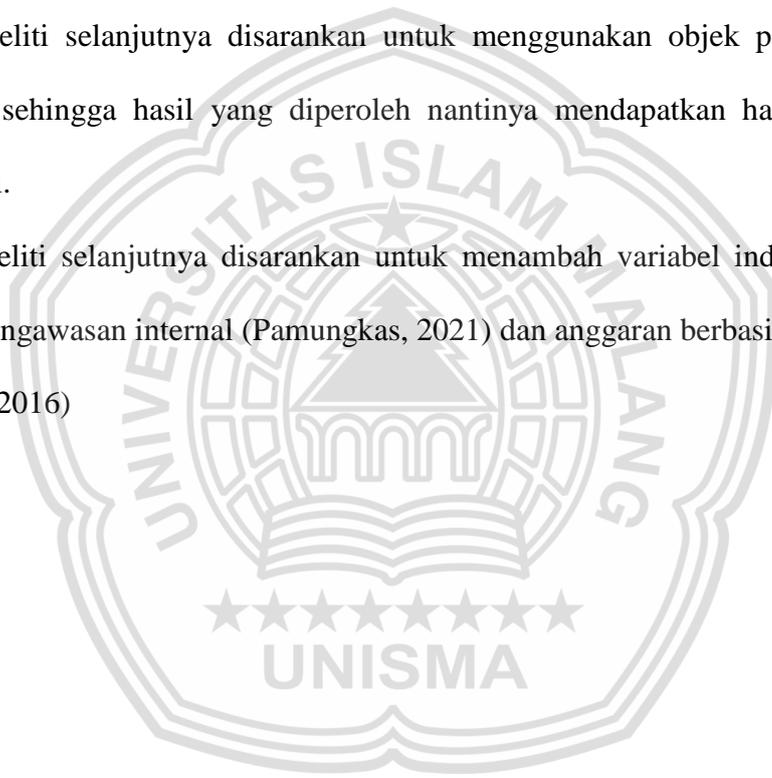
1. Penelitian ini hanya berfokus kepada instansi pemerintah di kota Malang sehingga hasil yang di peroleh tidak dapat dijadikan pengambilan keputusan secara universal.

2. Model penelitian hanya menggunakan satu variabel independen yakni Akuntansi Sektor Publik sedangkan masih banyak variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek penelitian berbeda, sehingga hasil yang diperoleh nantinya mendapatkan hasil yang bervariasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen seperti pengawasan internal (Pamungkas, 2021) dan anggaran berbasis kinerja (Pratiwi, 2016)



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Agus Dwiyanto, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, PSKK-UGM, Yogyakarta.
- Agusta dan Sutanto. 2013. Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV Haragon Surabaya. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol 1 (3), p. 1-9
- Anthony, Robert & Govindarajan, Vijay. 2016. *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter. (2019). *Indonesia's 2019 Fraud Survey*. Acfe Indonesia
- Bastian, Indra. (2014). *Audit Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Biduri, Sarwenda. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Echols, J. M., Shadily, H., & Wolff, J. U. (1989). *An Indonesian-English Dictionary (Vol. 2)*. Cornell University Press.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Haryanto dan Sahmuddin serta Arifuddin, (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jones, H (1990). *Social Welfare in Third World Development*. London: MacMillan.
- LAN dan BPKP. 2010. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul 1. Akip. Jakarta.
- Mangkunegara. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya

- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset,Yogyakarta
- Mulyadi, D. 2015. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta
- Pamungkas, B. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggading*, 12(2), 1–11.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
- Pope Jeremy, (2003). *Strategi Memberantas Korupsi, Transparency International Indonesia (The Coalition Against Corruption)*, Jakarta
- Pratiwi. 2016. Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Dessertation Universitas Komputer Indonesia*.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Salamah, N., Sudarmanto, E., & Herlisnawati, D. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(3).
- Santoso, Urip dan Yohanes Joni Pabelum. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis Volume 4, Nomor 1, Hal. 14- 33 (ISSN : 0216- 1249)*.
- Sanusi Anwar, (2011), *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Sihombing, E., Erlina, Rujiman, & Muda, I. (2019). The Effect of Forensic Accounting, Training, Experience, Work Load and Professional Skeptic on Auditors Ability to Detect of Fraud. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 474–480

Soleman, Rusman. 2007. Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ). Disertasi Unpad.

Sugiyono. (2019). In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (p. 394). Bandung : Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia(Cetakan ke tujuh). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

([www.transparency.org](http://www.transparency.org))

([www.hdr.undp.org](http://www.hdr.undp.org))

